
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA BANDUNG
TAHUN 2019



PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan mengucap syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, akhirnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung ini dapat diselesaikan.

Dalam proses penyusunannya senantiasa berupaya mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih atas bimbingan dan perhatian yang telah diberikan terutama kepada yang terhormat :

1. Bapak H. ODED M. DANIAL, selaku Wali Kota Bandung
2. Bapak H. YANA MULYANA, selaku Wakil Wali Kota Bandung
3. Bapak H. EMA SUMARNA, selaku Sekretaris Daerah Kota Bandung

Kepada semua pihak, baik tim penyusun laporan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung maupun rekan/teman sejawat di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang telah memberikan informasi, saran, kritik dan pendapat yang bersifat membangun guna penyempurnaan laporan ini.

Semoga Allah Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dengan harapan segala upaya yang dilaksanakan menjadi bukti nyata pengabdian kita kepada masyarakat.



Dinas Pekerjaan Umum

Akhirnya kami berharap semoga Laporan Kinerja ini dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung khususnya dan Pemerintah Kota Bandung pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Kota Bandung,.....

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kota Bandung,

Ir. DIDI RUSWANDI, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19680710 199503 1 002



DAFTAR ISI

PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1-1
1.1 Latar Belakang	1-1
1.2 Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum.....	1-2
1.3 Tugas dan Fungsi.....	1-2
1.4 Isu Strategis.....	1-3
1.5 Landasan Hukum	1-3
1.6 Sistematika.....	1-3
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA	2-1
2.1 Rencana Strategis	2-1
2.1.1 Visi.....	2-2
2.1.2 Misi	2-2
2.1.3 Tujuan dan Sasaran.....	2-3
2.2 Indikator Kinerja Utama	2-4
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2019.....	2-4
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA.....	3-1
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja	3-1
3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama	3-3
3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis.....	3-4
3.4 Akuntabilitas Keuangan	3-1
BAB 4 PENUTUP	4-1



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pekerjaan Umum selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bandung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan



nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung Tahun 2019 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum

1.3 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung mempunyai tugas dan kewajiban :

Membantu Walikota dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Pekerjaan Umum meliputi Jalan, Jembatan, Trotoar, Penerangan Jalan Umum (PJU), Drainase dan Sumber Daya Air.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan lingkup Pekerjaan Umum
2. Pelaksanaan kebijakan lingkup Pekerjaan Umum
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup Pekerjaan Umum
4. Pelaksanaan administrasi dinas lingkup Pekerjaan Umum
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya



Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh Ir. DIDI RUSWANDI, MT yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat structural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:

1.4 Isu Strategis

1.5 Landasan Hukum

LKIP Kota Bandung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013 - 2018.

1.6 Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bandung Kota Bandung Tahun 2019 adalah :

BAB I PENDAHULUAN



Dinas Pekerjaan Umum

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah rewiu.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP



BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota Bandung terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.



Dinas Pekerjaan Umum

Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2019-2023.

Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2019-2023 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

2.1.1 Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Bandung dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Kota Bandung yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera

Visi Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung Tahun 2019-2023 adalah :

Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, dan Agamis

2.1.2 Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung Tahun 2019-2023 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan



2.1.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2019-2023 sebanyak 4 sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya infrastruktur kota terpadu dan berkualitas	Meningkatnya Infrastruktur Jalan Yang Berkualitas dan Merata	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	79	n/a	n/a	n/a	n/a
		Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur serta Penataan Sungai	Lama genangan yang tertangani pada titik genangan	100	80	60	40	30
		Meningkatnya Penyediaan Pelayanan Penerangan Jalan Umum di Wilayah Kota Secara Merata	Persentase PJU dalam kondisi baik	100	100	100	100	100
		Memantapkan Sistem Administrasi dan Pendukung Penyelenggaraan Pelayanan SKPD	Prosentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	100	100	100



2.2 Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 060/Kep.497 – Orpad/2019 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kota Bandung Dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2019 – 2023.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Infrastruktur Jalan Yang Berkualitas dan Merata	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	Mendukung sasaran RPJMD	[Panjang jalan dalam kondisi baik] / [Panjang jalan total] / 100%	Kualitas/kondisi infrastruktur jalan adalah aspek ke-6 dari 12 aspek kemacetan yang telah diidentifikasi (halaman 186 RPJMD 2018-2023)
2	Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur serta Penataan Sungai	Lama genangan yang tertangani pada titik genangan	Menit	Memenuhi target RPJMD	Diukur dari durasi terjadinya genangan di badan jalan setinggi 30 cm atau lebih	Yang disebut genangan adalah terendahnya suatu kawasan perkotaan lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam (Lampiran II Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang halaman 29)

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan



Dinas Pekerjaan Umum

perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung Tahun 2019 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung Tahun 2019-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2019, Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung
Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Infrastruktur Jalan Yang Berkualitas dan Merata	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	79
2	Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur serta Penataan Sungai	Lama genangan yang tertangani pada titik genangan	100
3	Meningkatkan Penyediaan Pelayanan Penerangan Jalan Umum di Wilayah Kota Secara Merata	Persentase PJU dalam kondisi baik	100
4	Memantapkan Sistem Administrasi dan Pendukung Penyelenggaraan Pelayanan SKPD	Prosentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100



BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2019 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum.

3.1 Capaian Kinerja

3.1.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya



masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	Merah
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Hijau
> 100%	Melebihi Target	Biru

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

**Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung
Tahun 2019**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	Biru Tua
2	Baik	75.00 – 89.99	Hijau
3	Cukup	65.00 – 74.99	Jingga
4	Kurang	50.00 – 64.99	Kuning
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	Merah



Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2019-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2019. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2019, hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum berdasarkan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 060/Kep.497 – Orpad/2019 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kota Bandung Dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2019 – 2023, telah ditetapkan sebanyak 2 sasaran dan sebanyak 2 indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator

3.1.2 Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor 800/0495-DPU/2019 tanggal 20 Maret 2019 dan melalui Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 060/Kep.497 – Orpad/2019 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kota Bandung Dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Di Lingkungan



Pemerintah Kota Bandung Tahun 2019 – 2023. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung tahun 2019 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung
Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	[Panjang jalan dalam kondisi baik] / [Panjang jalan total] / 100%	%	79	80.64	102.08
2	Lama genangan yang tertangani pada titik genangan	Diukur dari durasi terjadinya genangan di badan jalan setinggi 30 cm atau lebih	Menit	100	63,3	157,98

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan pada indikator Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, dengan capaian kinerja 102.08 %, pada indikator Lama genangan yang tertangani pada titik genangan, dengan capaian kinerja 157,98%.

3.1.3 Pengukuran Kinerja

Secara umum Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra



2019-2023. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung Tahun 2019-2023 sebanyak 4 sasaran.

Tahun 2019 adalah tahun ke 1 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, dari sebanyak 4 sasaran strategis dengan sebanyak 4 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja
Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	79	80.64	102.08
2	Lama genangan yang tertangani pada titik genangan	Menit	100	63,3	157,98
3	Persentase PJU dalam kondisi baik	%	100	100	100.00
4	Prosentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	99.61	99.61

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas pada beberapa table berikut :

Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja Sasaran
Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	50.00 %
2	Sesuai Target	25.00 %
3	Tidak Mencapai Target	25.00 %

Dari sebanyak 4 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Pencapaian target Misi

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 1	4	2	50.00	1	25.00	1	25.00
	Jumlah	4	2	50.00	1	25.00	1	25.00

Dari sebanyak 4 sasaran dengan sebanyak 4 indikator kinerja, pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase
A.	Misi 1	4	
1	Melebihi/Melampaui Target	2	50.00 %
2	Sesuai Target	1	25.00 %
3	Tidak Mencapai Target	1	25.00 %

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-pembandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.



- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2019 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 4 sasaran dan sebanyak 4 indikator kinerja dari sebanyak 1 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung tahun 2019-2023. Analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci diuraikan pada sub bab berikutnya.

3.1.3.1 Sasaran 1: Meningkatnya Infrastruktur Jalan Yang Berkualitas dan Merata

Capaian Kinerja Sasaran 1 Meningkatnya Infrastruktur Jalan Yang Berkualitas dan Merata diukur dengan indikator proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, dimana pada Tahun 2019 DPU menargetkan 79% jalan kota dalam kondisi baik. Kondisi ini dicapai dari realisasi kegiatan pembangunan, pemeliharaan berkala dan pemeliharaan rutin yang dilaksanakan sepanjang tahun 2019. Perincian data pemeliharaan berkala jalan yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.6
Pemeliharaan Berkala Jalan Tahun 2019

Nama Ruas	Panjang	Nama Ruas	Panjang
Jl. Aditya	168,00	Jl. Pajagalan	790,00
Jl. Alwa Barat RW 05	100,00	Jl. Pamekasan, Jl. Sampang dan Jl. Bangkalan	331,60
Jl. Alwa Timur RW 05	100,00	Jl. Pamitran Raya	132,50
Jl. Anggrek	924,60	Jl. Parakan Wangi dan Jl. Parakan Wangi I	429,50
Jl. Babakan Ciparay Lama	162,00	Jl. Parang Raya	265,40
Jl. Babakan Jeruk III E	110,00	Jl. Pasang	216,00
Jl. Batu Indah XII	129,30	Jl. Pasanggrahan I	100,50
Jl. Beta	155,00	Jl. Pasir Muara VI	164,00
Jl. Bijaksana dan Jl. Bijaksana Dalam I	128,40	Jl. Pasir Samudra dan Jl. Pasir Sagara	152,00
Jl. Bijaksana II	121,00	Jl. Pelikan	383,50
Jl. Blok Desa XII	195,00	Jl. Permata Elok I	308,00
Jl. Blok L5 dan L6 Panyileukan	197,30	Jl. Prambanan	113,70
Jl. Blok M Panyileukan	208,50	Jl. Ranca Bulan	200,80
Jl. Boscha	129,20	Jl. Ranca Mulya	179,00



Dinas Pekerjaan Umum

Nama Ruas	Panjang	Nama Ruas	Panjang
Jl. Bougenvil dan Jl. Teratai VI	208,00	Jl. Rancagoong Indah, Jl. Ranca Tengah	183,30
Jl. Buana Sari I	182,00	Jl. Rancawangi	113,00
Jl. Bunga Mas	210,00	Jl. Ranu, Jl. Ranu Lanjutan dan Jl. Rio Soesilo	261,00
Jl. Capricorn	250,50	Jl. Rengasdengklok Selatan	243,00
Jl. Cibeunying Hegar I	173,00	Jl. Riung Arum Barat V, VI, VII dan VII A	281,50
Jl. Cibeunying Hegar IV	131,50	Jl. Riung Asri Raya dan Jl. Riung Asri I, II, IV	341,90
Jl. Cibeunying Kolot I dan Cibeunying Kolot II	215,00	Jl. Riung Galih	181,00
Jl. Cibeunying Kolot III	219,50	Jl. Riung Makmur dan Jl. Riung Langgeng	266,00
Jl. Cibeunying Permai Raya	165,00	Jl. Riung Mas dan Jl. Ranca Mekar 2	97,70
Jl. Cibogo Tengah	285,00	Jl. Riung Mukti Raya dan Jl. Riung Endah	226,00
Jl. Cigadung Selatan I, Jl. Cigadung Selatan X	205,50	Jl. Sadang Tengah dan Jl. Sadang Sari I	85,20
Jl. Cigadung Selatan III, Jl. Cigadung Selatan VII	235,00	Jl. Salendro Timur VI	179,80
Jl. Cijaura Girang I	134,00	Jl. Santosa Asih	62,12
Jl. Cijawura Girang IV	166,00	Jl. Santosa Asih V	133,28
Jl. Cisaranten Kulon X	141,00	Jl. Sarimas II	160,50
Jl. Citra Panyileukan	226,50	Jl. Sarimas Raya	75,00
Jl. Conblok	181,00	Jl. Satria Raya	167,00
Jl. Dasarata	155,50	Jl. Saturnus Barat VI, VII, VIII dan IX	242,20
Jl. Dian Permai Raya	201,50	Jl. Sehati I dan II	193,00
Jl. Dirgantara VII	175,00	Jl. Sehati Raya dan Jl. Sehati 10	206,00
Jl. Ekadasa	186,00	Jl. Sekeloa	92,10
Jl. Farmakologi	255,50	Jl. Sekeloa Utara, Jl. Ciheulang	143,00
Jl. Gagak	1.295,00	Jl. Sentausa	87,00
Jl. Gempol Elok 1	123,00	Jl. Serang	173,00
Jl. Guntur Madu	184,00	Jl. Soehodo, Jl. Soehodo II dan Jl. Soehodo III	269,60
Jl. Guntursari IV	143,00	Jl. Soerjono dan Jl. Muhtarudin Raya	280,00
Jl. Harapan	195,00	Jl. Softball	137,00
Jl. Hasta	229,00	Jl. Soma III	228,00
Jl. Ikhlas III, IV	210,40	Jl. Somawinata	150,00
Jl. Ikhlas V	109,40	Jl. Srisuci	225,00
Jl. Irsyad	137,00	Jl. Sriwenda	228,00
Jl. Istiqomah	175,00	Jl. Sriwulan	158,00
Jl. Jajaway Timur-Barat dan Jl. Parakan Saat	742,00	Jl. Sugandi Selatan	133,50



Dinas Pekerjaan Umum

Nama Ruas	Panjang	Nama Ruas	Panjang
Jl. Jaka Sentana, Jl. Jaka Raharja (lanjutan)	232,00	Jl. Sukaasih II	235,00
Jl. Jupiter Barat 21, 22 dan 25	238,00	Jl. Sukaasih V	126,65
Jl. Jupiter Barat Blok T2	210,10	Jl. Sukabumi Dalam II	115,50
Jl. Kampus V	175,00	Jl. Sukahaji Permai	319,30
Jl. Karang Tineung Indah III	221,20	Jl. Sukahaji Permai I	123,30
Jl. Kasmin	122,50	Jl. Sukamulya Indah XII	190,50
Jl. Kebonlega	258,60	Jl. Sukapura	236,00
Jl. Kembang Sepatu	101,50	Jl. Sukasenang Raya	202,50
Jl. Kembar Barat Baru	209,00	Jl. Sumber Asih/ Babakan	145,00
Jl. Kembar Baru Selatan I	144,00	Jl. Supadio	150,00
Jl. Kembar Timur VI	220,60	Jl. Tanjungsari	481,00
Jl. Kencana Wangi Raya	698,00	Jl. Teraso RW 05	124,50
Jl. Lamping	158,00	Jl. Teratai dan Jl. Teratai I	179,80
Jl. Lauk Emas	96,40	Jl. Terminal Sadang Serang	125,00
Jl. Lembah Sukaresmi I	253,00	Jl. Terusan Baladewa	513,90
Jl. Lembah Sukaresmi II	181,80	Jl. Terusan Cijerah	110,40
Jl. Madura	130,00	Jl. Terusan Holis	221,10
Jl. Marga Kencana I, II, III, IV, V dan VIII	484,70	Jl. Terusan Padasaluyu	225,00
Jl. Mekar Arum, Jl. Mekar Manis dan Jl. Mekar Indah	266,50	Jl. Tubagus Ismail VII	179,50
Jl. Merkuri Tengah VII, VIII dan XI	318,00	Jl. Tubagus Ismail XV	221,00
Jl. Merkuri Timur II dan III	256,50	Jl. Ujungberung Indah Asri I	146,00
Jl. Meteor Selatan II, III dan IV	172,90	Jl. Ujungberung Indah Raya	147,00
Jl. Moch. Toha [dari Jl. BKR - Jl. Inggit Garnasih]	621,00	Jl. Uranus Tengah dan Selatan	42,40
Jl. Muhtarudin I dan II, Jl. Soehodo I	305,10	Jl. Uranus Tengah I (Sebagian, Jl. Uranus Tengah III, Jl. Uranus Tengah IV, dan Jl. Uranus Tengah V)	239,50
Jl. Mulia	98,00	Jl. Waas B	258,00
Jl. Nagrog	464,00	Jl. Wangsa Reja	164,50
Jl. Neptunus Timur	207,00	Jl. Winaya Agung XI	184,00
Jl. Nirwana dan Mandala	157,80	Jl. Yudawasthu Pramuka	191,00
Jl. Padepokan II, III dan IV	211,80	Total	33252,65

Perincian data pemeliharaan rutin jalan yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 ditunjukkan pada tabel di bawah ini.



Tabel 3.7
Pemeliharaan Rutin Jalan Tahun 2019

Pemeliharaan Rutin Jalan	Luas (m²)
Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Bojonagara	18976,45
Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Cibeunying	24320
Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Tegallega	24241
Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Karees	31306
Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Ujungberung	22035
Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Gedebage	41144,97
Total	162.023

Selanjutnya data realisasi ini diinputkan ke dalam database kondisi jalan, sebagai pemutakhiran data kondisi jalan yang dilaksanakan setiap tahun. Database jalan ini mencatat kondisi jalan aktual baik yang dipelihara maupun tidak dipelihara.

Data perkembangan kondisi jalan di Kota Bandung tahun 2016-2019 ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.8
Data Kondisi Jalan di Kota Bandung
Tahun 2016-2019

Kondisi Jalan (%)		2016	2017	2018	2019
Kondisi Baik	(1)	75.50	77.01	79.55	80.64
Kondisi Sedang	(2)	15.24	14.85	12.79	11.74
Kondisi Rusak Ringan	(3)	7.49	6.76	6.38	6.12
Kondisi Rusak Berat	(4)	1.78	1.38	1.27	1.49
Kondisi Mantap	(5) = (1) + (2)	90.74	91.86	92.34	92.38
Kondisi Tidak Mantap	(6) = (3) + (4)	9.27	8.14	7.65	7.61

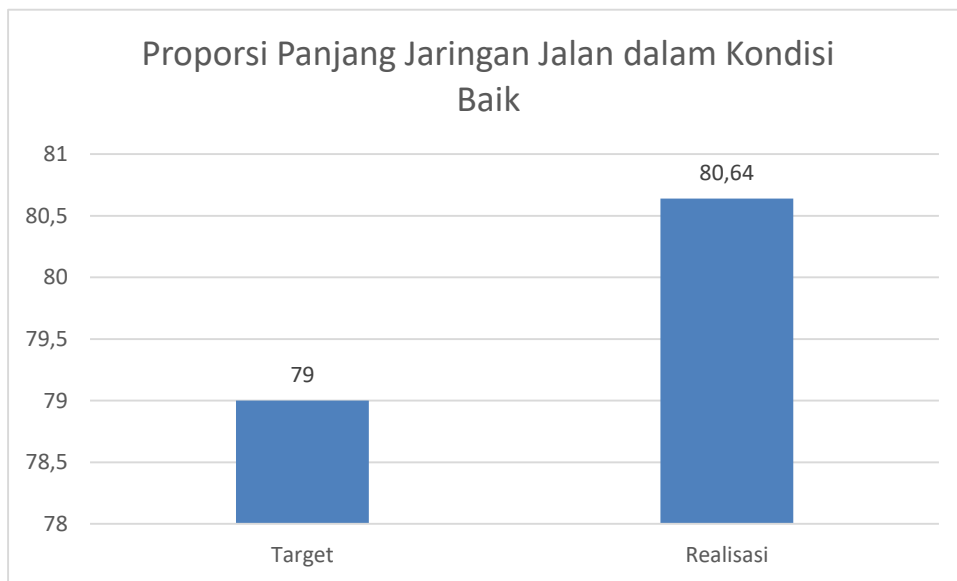
Berdasarkan rekapitulasi data ini terlihat bahwa persentase jalan dalam kondisi baik di Kota Bandung pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 1,09% atau sepanjang 10,5 km dari total panjang jalan kota sepanjang 959,7 km.



Dari rekapitulasi data tersebut diketahui Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.9
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Infrastruktur Jalan Yang Berkualitas dan Merata

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%
			Target	Realisasi	
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	79	80.64	102.08



Sasaran Meningkatkan Infrastruktur Jalan Yang Berkualitas dan Merata dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

"Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik"

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik" adalah sebesar 80.64% dari target sebesar 79% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 102.08 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik diukur dengan perhitungan sebagai berikut:

- Panjang jalan dalam kondisi baik = 773,914 km
- Panjang jalan keseluruhan = 959,689 km

- Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik = $773,914 \text{ km} / 959,689 \text{ km} = 80,64\%$.

Tahun 2019 adalah tahun ke 1 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik" tahun ini adalah sebesar 102.08 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Pekerjaan Umum maka capaian kinerjanya mencapai 96.00 %.



Gambar 3.1 Dokumentasi pekerjaan ligkup Jalan dan Jembatan Tahun 2019.

3.1.3.2 Sasaran 2: Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur serta Penataan Sungai

Capaian lama genangan yang tertangani pada titik genangan didapat dari hasil pengukuran kejadian genangan/cileuncang pada beberapa titik yang tersebar di seluruh Kota Bandung. Metode pengukuran dilakukan dengan menggunakan alat ukur sederhana yakni menggunakan stopwatch dan batang ukur ketinggian genangan, seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini:



Gambar 3.2 Peralatan Pengukuran Lama Genangan

Dari hasil pengukuran ini diperoleh rata-rata lama genangan adalah selama 63,3 menit. Data lokasi pengukuran kejadian genangan/cileuncang ditunjukkan pada tabel di bawah ini:



Tabel 3.10
Data Kejadian Genangan/Cileuncang Kota Bandung
Tahun 2019

No.	Lokasi Genangan/Cileuncang	Tinggi (cm)	Durasi (menit)	Keterangan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Jl.Cikutra Barat - Jl. Pahlawan (sal. Cikutra barat)	30.00	60.00	kejadian banjir 31 desember 2019
2	Jl. Terusan Pasteur - S. Cianting (depan Hotel Topaz & BTC)	10.00	N/A	kejadian genangan 13 desember 2019
3	Terminal Leuwipanjang	15.00	60.00	Kejadian banjir 22 desember 2019
4	Jl. Pagarsih - S. Citepus	20.00	N/A	kejadian banjir 13 desember 2019
5	Jalan Naripan / Sal. Cikapayang	10.00	N/A	kejadian banjir 20 desember 2019
6	Persimpangan Jl. Soekarno Hatta - Jl. Rumah Sakit	40.00	N/A	kejadian banjir 27 desember 2019
7	Perumahan Bumi Panyileukan (Sal. Cisalatri)	30.00	60.00	
8	Pasar Induk Gedebage Sal. Cipamulihan	50.00	120.00	kejadian banjir 27 desember 2019
9	Jl. Raya Sudirman (Sal. Irigasi Leuwilimus I & Sal. Pembuang)	20.00	120.00	kejadian banjir 22 desember 2019
10	Fly Over Kiarcondong / Sal. Cibeunying	N/A	N/A	tidak terjadi banjir
11	Persimpangan Jl. Soekarno Hatta & Jl. Pasir Koja ke arah gerbang Tol	20.00	60.00	kejadian banjir 22 desember 2019
12	S. Cicendo Jl. Kebon Kawung	N/A	N/A	tidak terjadi banjir
13	Jl. Cipaganti - Jl. Setiabudi / Sal. Cikalintu	N/A	N/A	tidak terjadi banjir
14	Jalan Cibogo / Sal. Cibogo	N/A	N/A	tidak terjadi banjir
15	Jl. Prof. Eickman - Sal. Leuwilimus I	3.00	60.00	tidak terjadi banjir
16	Jl. Kopo - Sal. Citarip	30.00	45.00	kejadian banjir 20 desember 2019
17	S. Citepus Jl. Arjuna	N/A	N/A	tidak terjadi banjir
18	Pusdai Jl. Suci / Sal. Lebak Larang	N/A	N/A	tidak terjadi banjir
19	Jl. Layang Cimindi / Gunung Batu (Sal. Ciwarga)	N/A	N/A	tidak terjadi banjir
20	Sal. Cikapayang - Jl. Supratman - Cisokan	30.00	42.00	kejadian banjir 13 desember 2019
21	Sal. Cikapayang - Gasibu	N/A	N/A	tidak terjadi banjir
22	Jl. Windu - Jl. Galunggung - Seskoad	N/A	N/A	tidak terjadi banjir
23	Jl. Sukamulya - S. Cipedes	20.00	N/A	kejadian banjir 13 desember 2019
24	Jl. Sukahaji - Jl. Gegerkalong	N/A	N/A	tidak terjadi banjir
25	Pasar Sederhana Sal. Cikalintu	N/A	N/A	tidak terjadi banjir
26	S. Cikapundung Kolot - belakang BSM	N/A	N/A	tidak terjadi banjir
27	S. Cibunut - Pasar Kosambi	N/A	N/A	tidak terjadi banjir
28	S. Cibunut - Baranangsiang	N/A	N/A	tidak terjadi banjir
29	Sal. Lebak larang - UNPAD	N/A	N/A	tidak terjadi banjir
30	Jl.Moch. Toha - Sal. Cipalasari / Sal. Ciateul	5.00	60.00	kejadian banjir 22 desember 2019
31	S. Cirangrang	N/A	N/A	tidak terjadi banjir
32	Jl. Nilem	N/A	N/A	tidak terjadi banjir
33	Sal. Ciborete - Alamanda	N/A	N/A	tidak terjadi banjir
34	S. Cijalupang - Leger Jalan	N/A	N/A	tidak terjadi banjir
35	Jl. Cibodas - antapani	N/A	N/A	tidak terjadi banjir
36	Jl. A.H. Nasution S. Cikiley	30.00	180.00	kejadian banjir 27 desember 2019
37	Jl. Caringin Sal. Leuwi Limus I	20.00	30.00	kejadian banjir 19 desember 2019
38	Jl. Dian Molek - Sal. Cibuntu	N/A	N/A	tidak terjadi banjir
39	Jl. Sukamaju / Jl. Cikaso S. Cibeunying	N/A	N/A	tidak terjadi banjir
40	Jl. Cilengkrang II Sal. Cipalasari	N/A	N/A	tidak terjadi banjir
41	Jl. Plered Sal. Antapani	N/A	N/A	tidak terjadi banjir
42	Jl. Purwakarta Sal. Ciparungpung	N/A	N/A	tidak terjadi banjir
43	SMA 9 - Lapang Husen Sal. Cianting	N/A	N/A	tidak terjadi banjir
44	Sal. Ciharalang - S. Cidurian	N/A	N/A	tidak terjadi banjir
45	Jl. Ujung Beurung - Polresta Bandung Timur	N/A	N/A	tidak terjadi banjir
46	Sal. Babakan Dese Antara Jl. A. Yani - Jl. Jakarta	10.00	30.00	kejadian banjir 27 desember 2019
47	Jl. Sumatra - SMPN 5 dan 2 (Sal. Melintas ke Jl. Jawa)	N/A	N/A	tidak terjadi banjir
48	Jl. Stasiun Timur Kebon Jeruk	N/A	N/A	tidak terjadi banjir
49	Sal. Cikudapateuh - Jl. Kacapiring, Jl. Gudang Utara	N/A	N/A	tidak terjadi banjir
50	Jl. Masuk FKOK UPI Sal. Ciparungpung	N/A	N/A	tidak terjadi banjir
51	S. Cibeureum - Cigondewah / Gempolsari / Sudiplak	N/A	N/A	tidak terjadi banjir
52	Persimpangan Jl. Pasirkoja - Sal. Cilimus I	30.00	44.00	kejadian banjir 17 desember 2019
53	Jl. Cibaduyut - Jl. Tol	15.00	30.00	kejadian banjir 19 desember 2019
54	Sal. Irigasi Dungusema Jl. Moch. Toha	N/A	N/A	tidak terjadi banjir
55	Sal. Crossing Jl. Soekarno Hatta - Sal. Cijagra (depan Hotel Lingga)	N/A	N/A	tidak terjadi banjir
56	S. Ciroyom Jl. Kopo	N/A	N/A	tidak terjadi banjir
57	Simpang Jl. Jakarta - Jl. Kiarcondong	40.00	60.00	kejadian banjir 13 desember 2019
58	Fly Over Jl. Cimindi	N/A	N/A	tidak terjadi banjir



No.	Lokasi Genangan/Cileuncang	Tinggi	Durasi	Keterangan
		(cm)	(menit)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
59	Terusan Jl. Kiaracondong - Jl. Soekarno Hatta	N/A	N/A	tidak terjadi banjir
60	Sal. Cilimus Jl. Sukajadi	N/A	N/A	tidak terjadi banjir
61	S. Cikapundung Gg. Apandi Jl. Braga	N/A	N/A	tidak terjadi banjir
62	Sal. Mercuri Jl. Tata Surya & Jl. Mercuri	20.00	25.00	kejadian banjir 13 desember 2019
63	Sal. Drainase Jl. Komplek Santosa Asih	N/A	N/A	tidak terjadi banjir
64	Sal. Rancabolang - Pasantren Jl. Rancabolang	40.00	90.00	kejadian banjir 27 desember 2019
65	Sal. Ciganitri Jl. Ciwastra	50.00	30.00	kejadian banjir 27 desember 2019
66	S. Cipagalo	N/A	N/A	tidak terjadi banjir
67	S. Cipariuk	N/A	N/A	tidak terjadi banjir
68	Perumahan Riung Bandung Jl. Braga	30.00	60.00	kejadian banjir 27 desember 2019
JUMLAH		618.00	1,266.00	
RATA-RATA		24.72	63.30	

Keterangan :

N/A = belum ada pengukuran (banjir kurang dari 30 cm dan/atau kurang dari 120 menit)

Berdasarkan hasil rekapitulasi data, diketahui bahwa nilai capaian rata-rata lama genangan yang terjadi adalah 63,3 menit atau sebesar 136,7% dari target yang diharapkan yakni 100 menit (melampaui target). Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Dinas Pekerjaan Umum, yakni lama genangan 30 menit (menurun 90 menit dari tahun dasar 2018), maka capaian kinerja mencapai 47,39%. Tabel perhitungan ditunjukkan di bawah ini:

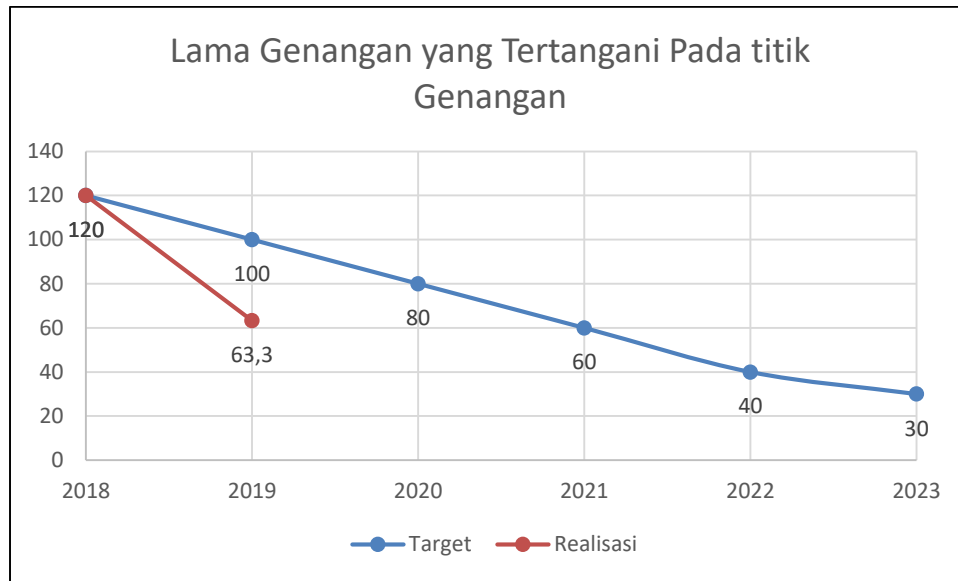
Tabel 3.11

Analisis Pencapaian Sasaran 2

Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur serta Penataan Sungai

URAIAN	LAMA GENANGAN		KINERJA
	TARGET	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4) = [(2) - { (3) - (2) }] / (2)
Kinerja terhadap Renja 2019	100	63.30	136,7%
Kinerja terhadap Renstra 2018-2023	30	63.30	89,0%

Grafik kinerja penurunan lama genangan yang menunjukkan target Renstra 2018-2023 dan realisasi 2019 ditunjukkan pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.3 Grafik Kinerja Penurunan Lama Genangan



Gambar 3.4 Dokumentasi pekerjaan lingkup Drainase dan Sumber Daya Air Tahun 2019.

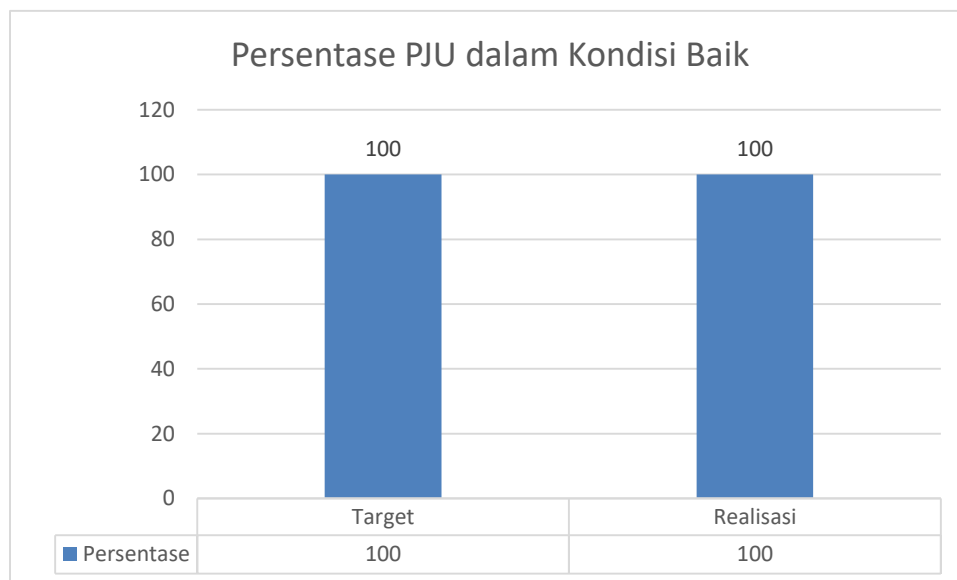


3.1.3.3 Sasaran 3: Meningkatkan Penyediaan Pelayanan Penerangan Jalan Umum di Wilayah Kota Secara Merata

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.12
Analisis Pencapaian Sasaran 3
Meningkatkan Penyediaan Pelayanan Penerangan Jalan Umum di Wilayah Kota Secara Merata

No	Indikator Kinerja	Tahun 2019		%
		Target	Realisasi	
1	Persentase PJU dalam kondisi baik	100	100	100.00



Sasaran Meningkatkan Penyediaan Pelayanan Penerangan Jalan Umum di Wilayah Kota Secara Merata dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase PJU dalam kondisi baik" adalah sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.

Capaian persentase PJU dalam kondisi baik diukur dengan rincian sebagai berikut:

- titik penerangan jalan umum dalam kondisi baik mencapai realisasi 7.750 titik dari target 1.000 titik
- jumlah titik PJU terbangun mencapai realisasi 1.600 titik dari target 850 titik

- Jumlah Dokumen acuan Kerja Pelaksanaan penerangan Jalan Umum mencapai realisasi 17 dokumen dari target 17 dokumen

Tahun 2019 adalah tahun ke 1 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase PJU dalam kondisi baik" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Pekerjaan Umum maka capaian kinerjanya mencapai 100.00 %.



Gambar 3.5 Dokumentasi pekerjaan lingkup Penerangan Jalan Umum Tahun 2019.

3.1.3.4 Sasaran 4: Memantapkan Sistem Administrasi dan Pendukung Penyelenggaraan Pelayanan SKPD

Pencapaian sasaran 4 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.13

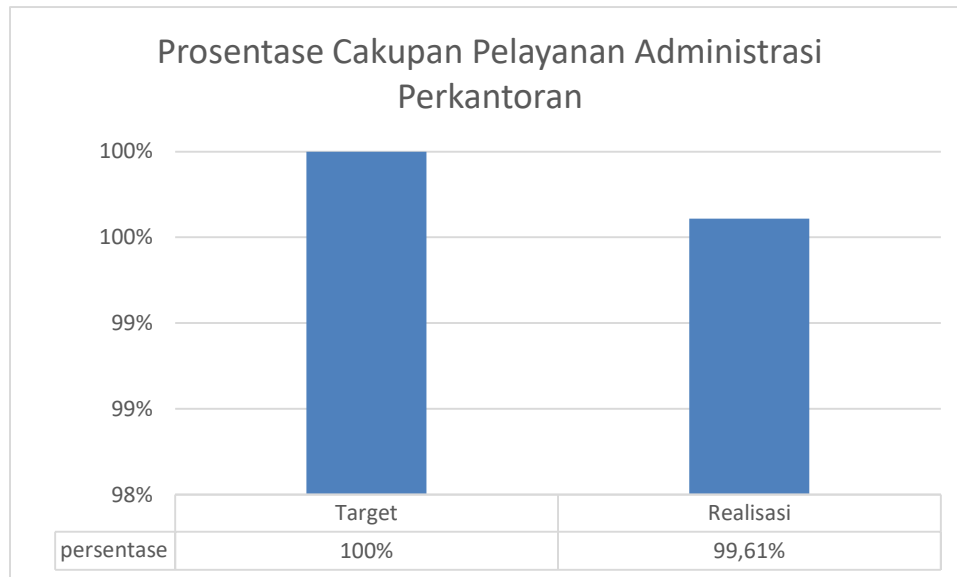
Analisis Pencapaian Sasaran 4

Memantapkan Sistem Administrasi dan Pendukung Penyelenggaraan Pelayanan SKPD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%
			Target	Realisasi	



1	Prosentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	99.61	99.61
---	---	---	-----	-------	-------



Sasaran Memantapkan Sistem Administrasi dan Pendukung Penyelenggaraan Pelayanan SKPD dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

"Prosentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran"

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Prosentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran" adalah sebesar 99.61 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 99.61 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan.

Capaian prosentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran tidak mencapai target 100%, dimana ada 2 (dua) output kegiatan yang tidak mencapai target yang direncanakan sebagai berikut:

- Jumlah Jenis Pengadaan Cetakan Dan Pengadaan mencapai realisasi 26 jenis dari target 30 jenis
- Jumlah Pengadaan peralatan gedung kantor mencapai realisasi 24 unit dari target 25 unit

Tahun 2019 adalah tahun ke 1 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Prosentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran" tahun ini adalah sebesar 99.61 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Pekerjaan Umum maka capaian kinerjanya mencapai 99.61 %.



3.1.4 Evaluasi dan Analisis

No	Indikator Sasaran Strategis	Lama genangan yang tertangani pada titik genangan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persentase PJU dalam kondisi baik
	Formulasi Pengukuran	Jumlah durasi genangan di semua titik genangan yang diukur dibagi jumlah titik genangan	Panjang jalan yang dibangun ditambah panjang jalan yang dipelihara dibagi total panjang jalan kota	Jumlah titik PJU yang dibangun ditambah jumlah titik PJU yang dipelihara dibagi target jumlah PJU dalam kondisi baik dalam setahun
	Target	100 menit	79%	100%
	Realisasi	63,3 menit	80,64%	100%
1	Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini	Berdasarkan hasil rekapitulasi data, diketahui bahwa nilai capaian rata-rata lama genangan yang terjadi adalah 63,3 menit atau sebesar 136,7% dari target yang diharapkan yakni 100 menit (melampaui target)	Capaian kinerja nyata "Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik" adalah sebesar 80.64% dari target sebesar 79% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 102.08 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.	Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase PJU dalam kondisi baik" adalah sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.



No	Indikator Sasaran Strategis	Lama genangan yang tertangani pada titik genangan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persentase PJU dalam kondisi baik
				<p>Capaian persentase PJU dalam kondisi baik diukur dengan rincian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">• titik penerangan jalan umum dalam kondisi baik mencapai realisasi 7.750 titik dari target 1.000 titik• jumlah titik PJU terbangun mencapai realisasi 1.600 titik dari target 850 titik• Jumlah Dokumen acuan Kerja Pelaksanaan penerangan Jalan Umum mencapai realisasi 17 dokumen dari target 17 dokumen



No	Indikator Sasaran Strategis	Lama genangan yang tertangani pada titik genangan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persentase PJU dalam kondisi baik
2	Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	<p>Indikator ini baru tercantum dalam RPJMD 2018-2023 dan tidak tercantum dalam periode sebelumnya. Tahun 2019 adalah tahun pertama periode RPJMD sehingga tidak ada parameter pembandingan.</p> <p>Kondisi awal indikator ini adalah 120 menit, maka realisasi kinerja tahun ini lebih baik daripada kondisi awal.</p>	<p>Pada tahun 2018, indikator kinerja jalan adalah persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik dengan capaian 100%.</p> <p>Apabila dibandingkan dengan capaian 2018, maka capaian tahun ini kurang dari capaian tahun sebelumnya.</p> <p>Namun demikian jika mengacu pada data kondisi jalan yang ada, maka capaian tahun ini sebesar 80,64% melebihi tahun 2018 sebesar 79,55%</p>	<p>Indikator ini baru tercantum dalam RPJMD 2018-2023 dan tidak tercantum dalam periode sebelumnya. Tahun 2019 adalah tahun pertama periode RPJMD sehingga tidak ada parameter pembandingan.</p> <p>Pada periode RPJMD sebelumnya, kinerja PJU diukur dengan indikator jumlah PJU terbangun dan jumlah PJU terpelihara. Apabila dibandingkan dengan tahun 2018, maka capaian kinerja tahun ini adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pembangunan PJU 2019 sebanyak 1600 titik, sedangkan pada tahun 2018 sebanyak 5117 titik.



No	Indikator Sasaran Strategis	Lama genangan yang tertangani pada titik genangan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persentase PJU dalam kondisi baik
				<ul style="list-style-type: none">Pemeliharaan PJU 2019 sebanyak 7750 titik, sedangkan pada tahun 2018 sebanyak 10.080 titik.
3	Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Dinas Pekerjaan Umum, yakni lama genangan 30 menit (menurun 90 menit dari tahun dasar 2018), maka capaian kinerja mencapai 47,39%.	Bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Pekerjaan Umum maka capaian kinerjanya mencapai 96.00 %.	Indikator kinerja persentase PJU dalam kondisi baik hanya digunakan pada tahun 2019, sedangkan mulai tahun 2020 hingga akhir periode RPJMD, indikator kinerja kembali dihitung dalam satuan jumlah titik PJU terbangun dan terpelihara. Bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Pekerjaan Umum maka capaian kinerjanya tahun ini adalah 1600 titik PJU terbangun + 7750 titik PJU dipelihara = 9350 titik, sedangkan target RPJMD adalah 2500 titik per tahun atau 12.500 titik



No	Indikator Sasaran Strategis	Lama genangan yang tertangani pada titik genangan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persentase PJU dalam kondisi baik
				pada akhir periode RPJMD. Maka capaian tahun ini mencapai $9350/12500 = 75\%$.
4	Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)	Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor : 01/PRT/M/2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun. Dengan demikian maka realisasi kinerja tahun ini (63,3 menit) lebih tinggi dari standar nasional (120 menit)	Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor : 01/PRT/M/2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang adalah sebesar 60%. Dengan demikian maka realisasi kinerja tahun ini (80,64%) lebih tinggi dari standar nasional.	-



No	Indikator Sasaran Strategis	Lama genangan yang tertangani pada titik genangan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persentase PJU dalam kondisi baik
5	Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	Keberhasilan pencapaian target kinerja tahun ini perlu disikapi secara cermat karena indikator kinerja lama genangan ini hanya didasarkan pada hasil pengukuran lokasi kejadian genangan, sehingga metode pengukuran dan penentuan sampel pengukuran harus dilakukan secara lebih cermat. Alternatif agar pengukuran kinerja lebih baik adalah dengan menentukan ruang lingkup pengukuran yang lebih spesifik, melalui identifikasi dan inventarisasi lokasi titik genangan yang ada.	Keberhasilan pencapaian target kinerja tahun ini didukung oleh realisasi pemeliharaan rutin jalan yang melebihi target yang telah ditentukan sebelumnya. Di samping itu, ada perbaikan metode pengukuran indikator kinerja yang telah menggunakan database kondisi jalan melalui aplikasi SIPDJD Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang pengukuran indikator kinerjanya tidak mempertimbangkan penurunan kondisi jalan pada ruas jalan yang tidak ditangani.	Keberhasilan pencapaian target kinerja tahun ini didukung oleh realisasi pembangunan dan pemeliharaan PJU yang melebihi target yang telah ditentukan sebelumnya. Namun demikian capaian ini perlu disikapi secara cermat, karena dari data realisasi ini disimpulkan bahwa target capaian yang ditetapkan terlalu rendah atau penghitungan realisasi capaian terlalu tinggi akibat adanya duplikasi penghitungan capaian pemeliharaan PJU karena banyaknya komponen PJU yang dipelihara pada titik yang sama.
6	Analisis atas efisiensi	Analisis tercantum pada Tabel 3.15	Analisis tercantum pada Tabel 3.15	Analisis tercantum pada Tabel 3.15



No	Indikator Sasaran Strategis	Lama genangan yang tertangani pada titik genangan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persentase PJU dalam kondisi baik
	penggunaan sumber daya			
7	Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	Keberhasilan pencapaian kinerja lama genangan didukung oleh kegiatan Pemeliharaan Rutin Daerah Aliran Sungai yang capaiannya melebihi target yakni 198.518,99 m1 dari target 100.000 m1.	Keberhasilan pencapaian kinerja panjang jaringan jalan dalam kondisi baik didukung oleh kegiatan Pemeliharaan Rutin Pekerjaan Umum (6 wilayah) yang secara akumulatif capaiannya melebihi target yakni 162023 m2 dari target 128500 m2.	Keberhasilan pencapaian kinerja PJU didukung oleh kegiatan pembangunan PJU dan kegiatan pemeliharaan PJU yang secara akumulatif capaiannya melebihi target (9350 titik dari target 2500 titik)



3.2 Realisasi Anggaran

Selama Tahun 2019 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung DPA Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 363.305.736.769,28 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 318.004.917.558,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 87,5%, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2019, Dinas Pekerjaan Umum kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 45.300.819.211,28. Hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung pada Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 3.14.

Dari Tabel 3.15 dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisiensi dan efektivitas yang telah dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung pada Tahun 2019.

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif / kurang efektif terhadap capaian kinerja sasaran organisasi.



Tabel 3.14

**Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung
Tahun 2019**

No 1	Program 2	Pagu 3	Realisasi 4	% 5	
Sasaran 1	Meningkatnya Infrastruktur Jalan Yang Berkualitas dan Merata				
1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum				
	1.1	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	45,491,469,103,00	41,130,279,024,00	90,41
	1.2	Pemeliharaan Saluran Drainase Jalan dan Trotoar	4,534,529,283,00	3,843,318,840,00	84,76
	1.3	Pengadaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan	804,401,687,00	587,618,761,00	73,05
	1.4	Pengadaan, Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat	4,086,112,814,00	3,984,735,549,00	97,52
	1.5	Operasi dan Pemeliharaan Rutin Pekerjaan Umum Wilayah Bojonagara	2,749,402,303,00	2,704,500,930,00	98,37
	1.6	Operasi dan Pemeliharaan Rutin Pekerjaan Umum Wilayah Cibeunying	3,364,422,558,00	3,028,031,475,00	90,00
	1.7	Operasi dan Pemeliharaan Rutin Pekerjaan Umum Wilayah Tegallega	2,627,832,373,00	2,592,477,650,00	98,65
	1.8	Operasi dan Pemeliharaan Rutin Pekerjaan Umum Wilayah Karees	2,878,376,885,00	2,729,098,750,00	94,81
	1.9	Operasi dan Pemeliharaan Rutin Pekerjaan Umum Wilayah Ujungberung	2,444,453,235,00	2,403,748,630,00	98,33
	1.10	Operasi dan Pemeliharaan Rutin Pekerjaan Umum Wilayah Gedebage	2,751,238,080,00	2,690,696,373,00	97,80
	1.11	Peningkatan Jalan Insidentil	5,312,862,162,00	4,273,011,630,00	80,43
2	Perencanaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum				
	2.1	Perencanaan Trotoar dan Drainase Jalan	1,000,000,000,00	743,998,083,00	74,40
	2.2	Perencanaan Jalan dan Jembatan	2,000,000,000,00	1,791,090,530,00	89,55
3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum				



No	Program		Pagu	Realisasi	%
1	2		3	4	5
	3.1	Pembangunan Trotoar dan Drainase Jalan	27,222,866,145,00	22,591,281,666,00	82,99
	3.2	Pembangunan Jalan dan Jembatan	28,430,960,354,00	25,251,947,431,00	88,82
4	Pembangunan Jalan dan Jembatan				
	4.1	Pembangunan Jalan	2,905,052,274,00	2,905,052,274,00	100,00
5	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong				
	5.1	Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-Gorong	16,810,579,00	16,810,579,00	100,00
6	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan				
	6.1	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	14,390,858,00	14,390,858,00	100,00
	6.2	Peningkatan Jalan Sejajar Tol sampai GBLA (Banprov)	19,000,000,000,00	12,812,109,578,00	67,43
	6.3	Peningkatan Jalan Sejajar Rel (Banprov)	12,000,000,000,00	8,425,522,000,00	70,21
7	Pemeliharaan Pekerjaan Umum				
	7.1	Pendukung konektivitas (DAK)	4,989,731,009,00	4,989,731,009,00	100,00
Total Per Sasaran			174.624.911.702.00	149.509.451.620.00	85,62
Sasaran 2	Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur serta Penataan Sungai				
8	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum				
	8.1	Pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air	54,953,316,941,00	52,237,124,803,00	95,06
	8.2	Pemeliharaan Rutin Daerah Aliran Sungai	10,078,945,726,00	9,589,320,340,00	95,14
9	Perencanaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum				
	9.1	Perencanaan Prasarana Sumber Daya Air	2,000,000,000,00	1,511,977,866,00	75,60
10	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum				
	10.1	Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air	12,971,745,172,00	4,865,711,866,00	37,51
11	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya				
	11.1	Normalisasi Sungai Cipamokolan (Banprov)	477,533,685,00	477,533,685,00	100,00
	11.2	Normalisasi Sungai Cidurian (Banprov)	145,201,316,00	145,201,316,00	100,00
	11.3	Normalisasi Sungai Citepus (Banprov)	247,909,698,00	247,909,698,00	100,00
12	Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya				
	12.1	Rehabilitasi Kawasan Kritis Daerah Tangkapan Sungai dan Danau	81,006,700,00	81,006,700,00	100,00



No	Program	Pagu	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	
Total Per Sasaran		80.955.659.238.00	69.155.786.274.00	85,42	
Sasaran 3	Meningkatkan Penyediaan Pelayanan Penerangan Jalan Umum di Wilayah Kota Secara Merata				
13	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum				
	13.1	Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	6,403,793,417,00	5,551,086,843,00	86,68
14	Perencanaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum				
	14.1	Perencanaan Penerangan Jalan Umum	1,500,000,000,00	1,320,757,210,00	88,05
15	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum				
	15.1	Pembangunan Penerangan Jalan Umum	32,537,938,508,00	29,014,176,854,00	89,17
Total Per Sasaran		40.441.731.925.00	35.886.020.907.00	88,74	
Sasaran 4	Memantapkan Sistem Administrasi dan Pendukung Penyelenggaraan Pelayanan SKPD				
16	Pelayanan Administrasi Perkantoran				
	16.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1,383,338,616,00	1,160,494,098,00	83,89
	16.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	578,349,014,00	569,316,000,00	98,44
	16.3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1,618,907,510,00	1,609,014,000,00	99,39
	16.4	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	240,900,000,00	202,937,000,00	84,24
	16.5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	548,462,073,00	522,454,200,00	95,26
	16.6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	517,734,250,00	497,554,150,00	96,10
	16.7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	139,868,281,00	135,393,500,00	96,80
	16.8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	887,546,369,00	874,081,100,00	98,48
	16.9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	500,962,000,00	452,019,000,00	90,23
	16.10	Penyediaan Makanan dan Minuman	300,903,680,00	280,847,650,00	93,33
	16.11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	700,000,000,00	694,168,174,00	99,17
	16.12	Penyediaan jasa pengamanan kantor	1,605,895,778,00	1,593,409,200,00	99,22
17	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
	17.1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	4,948,665,800,00	4,401,020,509,00	88,93
	17.2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	152,312,144,00	149,116,000,00	97,90



Dinas Pekerjaan Umum

No	Program		Pagu	Realisasi	%
1	2		3	4	5
	17.3	Pengadaan Mebeulair	77,383,056,00	76,813,000,00	99,26
	17.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	3,033,763,018,00	2,955,535,684,00	97,42
18	Peningkatan Disiplin Aparatur				
	18.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	568,374,840,00	555,786,000,00	97,79
	18.2	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	708,954,000,00	625,933,000,00	88,29
19	Perencanaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum				
	19.1	Penyusunan Strategi dan Kebijakan Kedinasan	1,000,000,000,00	679,205,700,00	67,92
Total Per Sasaran			19.512.320.429.00	18.035.097.965.00	92,43
Grand Total			315.534.623.294.00	272.586.356.766.00	86,39



Tabel 3.15

Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum

Periode 2019 – 2023

Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan				
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%	
1	Meningkatnya Infrastruktur Jalan Yang Berkualitas dan Merata	1.1 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	79	80.64	102,1	1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	77.045.100.483	69.967.517.612	90,81
							2	Perencanaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	3.000.000.000	2.535.088.613	84,5
							3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	55.653.826.499	47.843.229.097	85,97
							4	Pembangunan Jalan dan Jembatan	2.905.052.274	2.905.052.274	100
							5	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	16.810.579	16.810.579	100
							6	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	31.014.390.858	21.252.022.436	68,52
							7	Pemeliharaan Pekerjaan Umum	4.989.731.009	4.989.731.009	100
		RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR				102,1	TOTAL PER SASARAN	174.624.911.702	149.509.451.620	85,62	
							EFISIENSI (%)			16,46	
							EFEKTIFITAS (%)			119,2	
2	Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur serta Penataan Sungai	2.1 Lama genangan yang tertangani pada titik genangan	Menit	100	63,3	157,98	8	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	65.032.262.667	61.826.445.143	95,07
							9	Perencanaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	2.000.000.000	1.511.977.866	75,6
							10	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	12.971.745.172	4.865.711.866	37,51
							11	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	870.644.699	870.644.699	100
							12	Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya	81.006.700	81.006.700	100
		RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR				157,98	TOTAL PER SASARAN	80.955.659.238	69.155.786.274	85,42	
							EFISIENSI (%)			72,56	
							EFEKTIFITAS (%)			184,94	
3		3.1 Persentase PJU dalam kondisi baik	%	100	100	100	13	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	6.403.793.417	5.551.086.843	86,68



Dinas Pekerjaan Umum

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan							
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%				
	Meningkatkan Penyediaan Pelayanan Penerangan Jalan Umum di Wilayah Kota Secara Merata						14	Perencanaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	1.500.000.000	1.320.757.210	88,05			
							15	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	32.537.938.508	29.014.176.854	89,17			
							RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR			100	TOTAL PER SASARAN	40.441.731.925	35.886.020.907	88,74
											EFISIENSI (%)			11,26
							EFEKTIFITAS (%)			112,7				
4	Memantapkan Sistem Administrasi dan Pendukung Penyelenggaraan Pelayanan SKPD	4.1	Prosentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	99,61	99,61	16	Pelayanan Administrasi Perkantoran	9.022.867.571	8.591.688.072	95,22		
								17	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	8.212.124.018	7.582.485.193	92,33		
								18	Peningkatan Disiplin Aparatur	1.277.328.840	1.181.719.000	92,51		
								19	Perencanaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	1.000.000.000	679.205.700	67,92		
								RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR			99,61	TOTAL PER SASARAN	19.512.320.429	18.035.097.965
							EFISIENSI (%)			7,181				
							EFEKTIFITAS (%)			107,8				
							TOTAL KESELURUHAN	315.534.623.294	272.586.356.766	86,39				



BAB 4 PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung Tahun 2019 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung Tahun 2019. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung Tahun 2019 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung menetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 102.08 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 157,98 %
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00 %
- Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 99.61 %

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 4 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2019 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 315.534.623.294 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 272.586.356.766, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 42.948.266.528.



Dinas Pekerjaan Umum

Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung adalah 86,39% dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Bandung.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung.

Kota Bandung,.....

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kota Bandung,

Ir. DIDI RUSWANDI, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19680710 199503 1 002